

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Kota Palu selama Triwulan II 2026 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan cenderung akseleratif. Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) tercatat naik dari 2,13% pada April 2026 menjadi 2,82% pada Mei 2026, kemudian melonjak ke 3,46% pada Juni 2026, atau meningkat 1,33 poin persentase sepanjang triwulan berjalan. Inflasi bulanan (Month-to-Month) juga berfluktuasi dengan pola yang mengkhawatirkan, yakni 0,38% (April), sempat melandai ke 0,11% (Mei), lalu melonjak signifikan menjadi 0,79% pada Juni 2026 — angka M-to-M tertinggi dalam triwulan tersebut. Adapun inflasi Year-to-Date (Y-to-D) hingga akhir triwulan mencapai 2,53%, mengindikasikan bahwa laju kenaikan harga sepanjang tahun berjalan semakin mendekati level inflasi tahunan penuh.

Dari sisi kelompok pengeluaran, dua kelompok utama secara konsisten menjadi penyumbang terbesar inflasi Y-on-Y sepanjang triwulan. Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya—yang di dalamnya mencakup komoditas emas perhiasan—tercatat memberikan andil tertinggi setiap bulan, yaitu 1,35% (April), 1,41% (Mei), dan 1,14% (Juni), sejalan dengan tren kenaikan harga emas global yang berlangsung sepanjang tahun 2026. Sementara itu, kelompok Makanan, Minuman & Tembakau justru menunjukkan tren andil yang terus membesar dan menjadi pendorong utama kedua, meningkat tajam dari 0,37% (April) menjadi 0,62% (Mei), lalu melonjak signifikan menjadi 1,09% pada Juni 2026. Kelompok Transportasi turut memperlihatkan tren serupa dengan andil yang naik bertahap dari 0,05% (April) menjadi 0,25% (Mei) dan 0,52% (Juni), mengindikasikan mulai munculnya tekanan biaya distribusi dan mobilitas yang berpotensi merambat ke sektor lain.

Pada sisi harga barang kebutuhan pokok dan penting, hasil pemantauan harga harian di Pasar Manonda menunjukkan bahwa Cabai Rawit Merah dan Tomat kembali menjadi komoditas yang paling sering mengalami gejolak harga signifikan, sejalan dengan meningkatnya andil kelompok Makanan pada Juni 2026. Secara relatif, posisi inflasi Kota Palu masih berada pada level moderat dibandingkan kota pantauan lain di Sulawesi Tengah: pada April dan Mei, Kota Palu (2,13% dan 2,82%) berada di bawah Kabupaten Luwuk yang mencatat inflasi tertinggi (3,65% dan 3,98%), sementara pada Juni posisi inflasi tertinggi beralih ke Kabupaten Toli-Toli (5,41%). Adapun Kabupaten Morowali konsisten mencatatkan inflasi Y-on-Y terendah sepanjang triwulan (1,60%-2,82%).

Melihat pola pergerakan tersebut, terdapat sejumlah risiko inflasi ke depan yang perlu diwaspadai pada Triwulan III 2026. Pertama, momentum kenaikan inflasi selama tiga bulan berturut-turut belum menunjukkan tanda perlambatan, khususnya dari kelompok Makanan dan Transportasi yang andilnya terus membesar. Kedua, harga emas dunia yang diperkirakan masih bertahan tinggi berpotensi terus menekan kelompok Perawatan Pribadi sebagai kontributor inflasi terbesar. Ketiga, karakter musiman Cabai Rawit Merah dan Tomat membuat kedua komoditas ini rentan kembali bergejolak akibat gangguan pasokan maupun faktor cuaca, sehingga memerlukan mitigasi lebih dini dibandingkan pola penanganan pada triwulan berjalan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kota Palu pada Triwulan II 2026 bersumber dari volatilitas harga pangan strategis, khususnya Cabai Rawit Merah dan Tomat yang berulang kali memicu gejolak harga di Pasar Manonda, menandakan rantai pasok lokal mulai dari produksi hingga distribusi belum sepenuhnya stabil. Di sisi lain, tekanan dari kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya—yang didorong oleh kenaikan harga emas global—berada di luar jangkauan kendali kebijakan daerah, sementara kenaikan andil kelompok Transportasi yang terus membesar berpotensi menjadi biaya rambatan (cost-push) ke sektor lain apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah belum optimalnya efektivitas operasi pasar dalam menahan laju inflasi bulanan, terlihat dari tetap melonjaknya inflasi M-to-M pada Juni 2026 (0,79%) meskipun frekuensi kegiatan pasar murah dan JAMILA cukup padat pada bulan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara intensitas intervensi yang dilakukan dengan hasil yang dicapai di lapangan, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap ketepatan waktu, sasaran, dan skala pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sepanjang Triwulan II 2026, TPID Kota Palu telah melaksanakan sejumlah kegiatan pengendalian inflasi secara berkelanjutan, meliputi Mobil Gade Nalumako sebanyak 5 kali di berbagai kelurahan (Balaroa, Tatura, Donggala Kodi, Birobuli Utara, dan Mamboro), Pasar Murah sebanyak 5 kali yang terkonsentrasi pada Juni di Kelurahan Layana, Tondo, Kecamatan Palu Barat, dan Tatanga, serta program JAMILA (Belanja Minggu Kendalikan Inflasi) yang mulai berjalan rutin sebanyak 3 kali di Lapangan Vatuleo. Selain itu, telah dilaksanakan pula High Level Meeting TPID pada 29 April di Ruang Rapat Bantaya dan kegiatan Workshop/Capacity Building pada 27 April di Swiss Bell Hotel sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan.

Pada aspek koordinasi dan pengawasan, telah dilaksanakan 4 kali Rapat Koordinasi (29 April, 5 Juni, 12 Juni, dan 13 Juni), dengan rapat pada 29 April secara khusus membahas tindak lanjut rekomendasi hasil HLM Triwulan II. Kegiatan Sidak Pasar juga dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada 20 Mei di Pasar Manonda dan Gudang Gula Pasir, serta pada 12 Juni di Pasar Manonda dan Gudang Bulog Tondo Palu, sebagai upaya pemantauan ketersediaan stok bahan pokok strategis.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada Triwulan II 2026 menunjukkan bahwa timing intervensi pasar murah dan JAMILA kurang selaras dengan tren kenaikan harga, karena kegiatan justru terkonsentrasi pada Juni saat inflasi M-to-M sudah melonjak ke 0,79%, sementara sinyal kenaikan andil kelompok Makanan sesungguhnya sudah mulai terlihat sejak Mei (0,62%). Hal ini mengindikasikan bahwa pola intervensi masih bersifat reaktif terhadap kondisi yang sudah terjadi, bukan bersifat preventif untuk mencegah lonjakan harga lebih lanjut. Dari sisi cakupan wilayah, pelaksanaan kegiatan sudah cukup merata menjangkau berbagai kecamatan dan kelurahan, namun frekuensi kegiatan pada April tergolong rendah dibandingkan Mei dan Juni.

Kegiatan Sidak Pasar dan pengecekan stok Bulog maupun gula pasir sudah berjalan sesuai jadwal, namun belum tampak berkorelasi kuat dalam menahan laju kenaikan kelompok Makanan pada Juni 2026. Di sisi lain, intensitas Rapat Koordinasi yang meningkat—dengan 3 dari 4 pertemuan terselenggara pada Juni—menunjukkan respons kelembagaan yang semakin sigap seiring naiknya tekanan inflasi, meskipun efektivitas rekomendasi yang dihasilkan masih perlu dikonfirmasi melalui data inflasi pada bulan-bulan berikutnya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kota Palu perlu mempercepat dan memajukan jadwal operasi pasar/pasar murah ke awal triwulan agar sifatnya lebih preventif, dengan fokus intervensi pada komoditas Cabai Rawit Merah dan Tomat melalui kerja sama pasokan dengan daerah sentra produksi serta perluasan program JAMILA yang baru berjalan. Monitoring biaya transportasi dan distribusi logistik pangan juga perlu diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan, mengingat andil kelompok ini terus meningkat sepanjang triwulan dan berpotensi menjadi sumber tekanan inflasi baru.

Selain itu, kegiatan Sidak Pasar dan gudang Bulog/gula sebaiknya dijadikan agenda rutin bulanan alih-alih insidental, guna mendeteksi risiko penimbunan atau kelangkaan sejak dini, disertai tindak lanjut yang terukur atas rekomendasi HLM Triwulan II agar capaiannya dapat dilaporkan dan dievaluasi pada Rapat Koordinasi berikutnya. TPID juga perlu memperkuat sinergi dengan TPAKD dan TP2DD untuk memperluas akses pembayaran digital (QRIS) pada kegiatan pasar murah/JAMILA, sehingga transaksi lebih efisien dan data pergerakan harga dapat dipantau secara lebih real-time sebagai dasar pengambilan kebijakan.